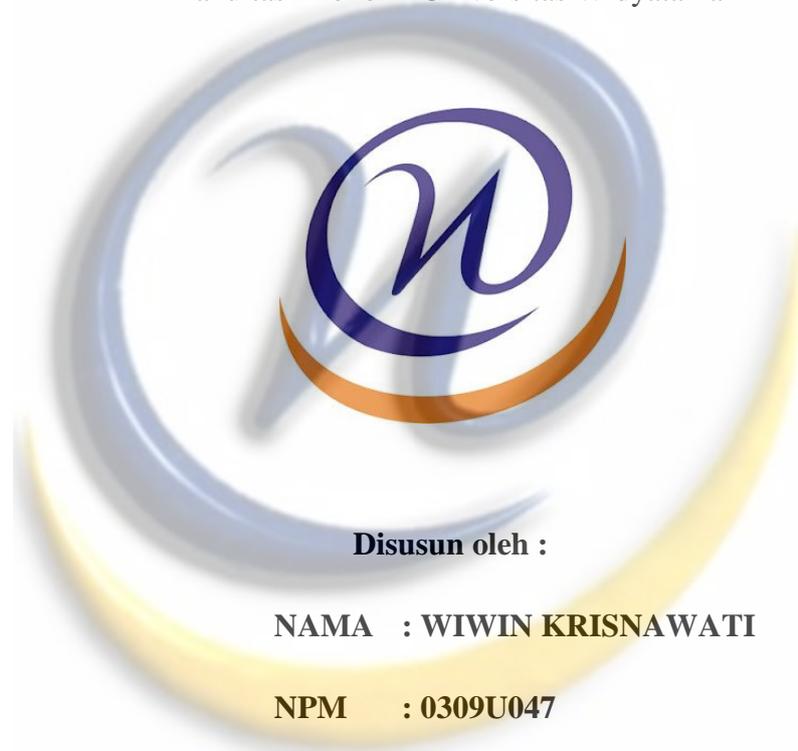


**TINJAUAN ATAS PEROLEHAN DAN PENYUSUTAN ASET TETAP  
PADA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BANDUNG I**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat dalam  
Menempuh Ujian Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama



**Disusun oleh :**

**NAMA : WIWIN KRISNAWATI**

**NPM : 0309U047**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III**

**FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**Terakreditasi (*Accredited*)**

**Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)**

**Nomor : 017/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/X/2008**

**BANDUNG**

**2013**

## **ABSTRAK**

PT. Jamsostek merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang asuransi. Kegiatan operasional didukung oleh penggunaan aset tetap, penggunaan aset tetap yang terus menerus menyebabkan penyusutan. Penyusutan akan dibebankan ke aset tetap sehingga mempengaruhi laba yang diperoleh. Untuk itu diperlukannya penggunaan metode penyusutan secara konsisten dengan mengacu kepada kebijakan Standar Akuntansi Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS PEROLEHAN DAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA PT. JAMSOSTEK CABANG BANDUNG I”**.

Tujuan tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui metode penyusutan Aset Tetap pada PT. Jamsostek. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan dari hasil kerja praktik maka dapat disimpulkan bahwa, perolehan aset tetap pada PT. Jamsostek dilakukan dengan perolehan aset tetap secara langsung, perolehan aset tetap secara kredit, perolehan aset tetap yang dibangun sendiri. Metode yang digunakan oleh PT. Jamsostek dalam melakukan perhitungannya penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (straight line method) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dilakukan secara konsisten.

**Kata Kunci: Aset Tetap, PSAK No. 16**

## **ABSTRACT**

*PT. Jamsostek is owned local enterprises in the rubber assurance. Operation supported by the use of fixed assets, the use of fixed assets which continue to cause shrinkage. Depreciation will be charged to fixed assets that affect profits. Therefore the need for the use of methods of depreciation are consistent with the policy refers to the Financial Accounting Standards. Based on the description above, the author prepared a report on the final project titled **"REVIEW OF FIXED ASSETS RESULT AND DEPRECIATION IN. JAMSOSTEK BRANCH OFFICE BANDUNG I"**.*

*The purpose of this final duty conducted to determine the depreciation method of fixed assets at PT. Jamsostek. The method used is description method, namely by way of field study consisting of observation, interviews, documentation and study of literary study.*

*Based on the results of practical work it can be concluded that the acquisition of fixed assets at PT. Jamsostek do with the acquisition of fixed assets directly, the acquisition of fixed assets on credit, the acquisition of self-constructed fixed assets. The method used by PT. Jamsostek in performing the calculation of depreciation of fixed assets using the straight-line method in accordance with Accounting Standards and done consistently.*

**Keywords:** *Fixed Assets, SFASNo. 16*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Menurut pengamat ekonomi Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng (2012) pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong anomali. Di tengah kondisi dunia yang sedang krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat hasil positif. Khususnya tingkat investasi swasta juga diperkirakan makin meningkat. Dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin maju, sebuah perusahaan yang didirikan harus memiliki suatu tujuan agar dapat membuat perusahaan hidup dalam jangka panjang, artinya perusahaan harus mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan. Suatu pencapaian tujuan akan tercapai apabila perusahaan dikelola dengan baik, sehingga sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Al. Haryono Jusup (2005:154) pada umumnya perusahaan melakukan investasi yang besar jumlahnya pada berbagai aset tetap. Dalam perusahaan-perusahaan yang padat modal, aset tetap kadang-kadang mencapai 75% dari total aset yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena aset yang tergolong sebagai aset tetap, umumnya mahal harganya. Cobalah tengok aset tetap sebuah perusahaan seperti tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan, dan peralatan. Pada umumnya barang-barang semacam itu mempunyai harga yang relatif mahal. Oleh karena itu tidak mengherankan bila nilai rupiah aset tetap dalam neraca perusahaan seringkali jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan aset lainnya, maka diperlukan pengelolaan yang tetap.

Seperti yang dikatakan Wild (2012) keputusan pengelolaan aset (*assets management decision*) menyangkut masalah operasionalisasi secara efisien dari berbagai komponen aset perusahaan dalam aktivitasnya mencapai tingkat penjualan secara maksimal. Aktivitas operasi merupakan sumber utama laba perusahaan. Kinerja keuangan merupakan keseluruhan hasil kerja

manajemen dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui kinerja keuangan yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangannya.

Sebagian perusahaan menginvestasikan sebagai besar modalnya dalam bentuk aset yang bersifat tahan lama yang digunakan untuk operasi sehari-hari. Aset yang bersifat tahan lama ini disebut aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dan properti investasi merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagai besar perusahaan. (Dwi Martani, dkk (2012:270)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.2) paragraf 06 aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap seperti tanah memiliki usia yang tidak terbatas dan dengan demikian mampu memberikan manfaat yang tidak terbatas, sementara itu aset tetap lainnya seperti peralatan, bangunan, dan pengembangan tanah (*land improvement*) akan kehilangan kemampuan mereka seiring dengan berlakunya waktu untuk menyediakan manfaat kepada perusahaan. Karenanya, biaya peralatan, bangunan, dan pengembangan tanah harus ditransfer ke akun beban dengan cara yang sistematis sepanjang umur manfaatnya. Transfer periodik ini dari biaya ke beban dinamakan dengan penyusutan atau depresiasi (*depreciation*). Penggunaan akun kontra aset memungkinkan biaya awal akuisisi aset tidak berubah, seperti tercatat dalam akun aset tetap. Istilah penyusutan yang digunakan dalam akuntansi sering kali menyesatkan karena istilah yang sama juga digunakan dalam bisnis

untuk menjelaskan penurunan nilai pasar dari suatu aset. Namun, biaya aset tetap yang belum menjadi beban seperti yang dilaporkan di neraca biasanya tidak sama dengan jumlah yang bisa dihasilkan dari penjualan aset tetap tersebut. Aset tetap ditujukan untuk digunakan dalam bisnis, bukan untuk dijual. Perusahaan diasumsikan terus melangsungkan usahanya (*going-concern*). Jadi, keputusan untuk melepas aset tetap sangat didasarkan pada pemanfaatan aset tersebut bagi perusahaan, bukan karena nilai pasarnya. (Warren et. al, 2005:496-497)

Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:16.8) paragraf 62 dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) menyebutkan bahwa metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.

Metode penyusutan yang dipilih oleh entitas harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap harus di-*review* berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, koreksi kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Sama seperti nilai sisa dan unsur manfaat, metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap juga harus di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. (Dwi Martani, dkk (2012:286-287)

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebagai usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) dan bergerak dibidang jasa. PT. Jamsostek (Persero) merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja dan juga sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarga akibat dari terjadinya

risiko-*risiko* sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero) mempunyai peranan penting dalam kelangsungan usaha perusahaan. Untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan, kendaraan, dan inventaris atau perabot kantor yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan proses klaim asuransi bagi peserta PT. Jamsostek (Persero). (Sumber: PT. Jamsostek)

Ada beberapa pendapat tentang metode penyusutan mana yang sebaiknya digunakan. Ada yang berpendapat bahwa metode yang paling memenuhi prinsip penandingan beban dan pendapatan seharusnya yang digunakan. Jika pendapatan yang dihasilkan oleh aset lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan menurun pada tahun-tahun akhir maka metode pembebanan menurun dianggap paling tepat. Di sisi lain, jika pendapatan yang dihasilkan oleh aset konstan selama masa manfaatnya maka penggunaan metode garis lurus dianggap paling tepat. (Raja Adri Satriawan Surya, 2012:179)

Dalam banyak kasus sulit untuk memproyeksikan pendapatan masa depan, oleh karena itu metode garis lurus harus digunakan dan untuk tujuan pajak juga harus digunakan untuk tujuan pembukuan. Hal ini menyediakan hal yang terbaik bagi kedua dunia tersebut pajak yang lebih rendah dan biasanya laba bersih yang lebih tinggi untuk tujuan pelaporan keuangan. (Kieso et. al, 2002:66-67)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang metode penyusutan yang digunakan untuk keperluan pelaporan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk aset kelompok 1 s.d. kelompok IV disusutkan dengan memakai metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*decline method*).
2. Untuk aset kelompok bangunan harus disusutkan dengan metode garis lurus.

3. Masa manfaat dan tarif penyusutan aset untuk jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Oleh karena itu terdapat 2 macam penyusutan yang harus dilakukan perusahaan, yaitu dari segi akuntansi dan perpajakan.

Perbedaan penerapan kedua metode tersebut menimbulkan masalah bagi perusahaan dalam hal pemberlakuan dan hasil perhitungan penyusutan. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan biaya dan pendapatan, perbedaan penetapan metode dan penetapan umur ekonomis aset tetap yang berlainan serta perbedaan harta yang disusutkan. (Gunadi, 2005:46)

Maka dari itu DirJen pajak turut menetapkan metode penyusutan yang dapat dilakukan perusahaan agar terdapat persamaan antara metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan dari segi akuntansi maupun perpajakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan penyusutan. (Raja Adri Satriawan Surya, 2012: 180)

Dari latar belakang di atas untuk menyusun tugas akhir ini, penulis mengambil judul **“Tinjauan Atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap Pada PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perolehan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero)?
2. Metode apa yang digunakan dalam melakukan penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero)?
3. Apakah metode penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero) telah dilakukan sesuai dengan PSAK No.16 (Revisi 2011)?

### **1.3 Tujuan Kerja Praktek**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perolehan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero).
2. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam melakukan penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero).
3. Untuk mengetahui apakah metode penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero) telah dilakukan sesuai dengan PSAK No.16 (Revisi 2011).

### **1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir**

Adapun tujuan dan kegunaan dari hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis  
Dengan adanya laporan tugas akhir ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan.
2. Bagi perusahaan  
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan juga masukan-masukan yang baik guna mencapai efektifitas perusahaan untuk mengadakan peningkatan dan perbaikan disegala bidang dan juga bermanfaat untuk kelancaran aktivitas perusahaan guna menunjang kemajuan perusahaan.
3. Bagi rekan mahasiswa  
Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penyusun selanjutnya.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Dalam menyusun Laporan Akhir ini, penulis melakukan praktik kerja yang dilakukan di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung 1 yang berlokasi di Jalan P.H.H Mustafa No. 39 Bandung. Waktu peneliti dimulai pada tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 September 2012, kegiatan kerja praktik dimulai pukul 08.00-17.00 WIB dari hari senin sampai hari jum'at.



## BAB II

### BAHAN RUJUKAN

#### 2.1 Aset Tetap

Menurut Al. Haryono Jusuf (2005:153), aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aset semacam ini biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun, kecuali manfaat yang diberikan oleh tanah.

##### 2.1.1 Definisi Aset Tetap

Definisi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.2) paragraf 06 adalah:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang:

- (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Definisi aset tetap menurut Soemarso S.R. (2005:20), aktiva tetap adalah:

“Aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar.”

Sedangkan definisi aset tetap menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:149), adalah:

“Aset tetap (*fixed assets*) adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan, atau untuk keperluan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.

Dari beberapa pengertian aset tetap diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap memiliki ciri-ciri:

1. Aset tetap merupakan barang-barang yang ada secara fisik yang diperoleh dan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan atau memproduksi barang-barang atau memberikan jasa pada perusahaan lain atau pelanggannya dalam usaha bisnis yang normal.
2. Aset tetap memiliki masa manfaat yang lama, akan tetapi manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin menurun dan diakhir masa manfaatnya harus diganti atau dibuang, kecuali manfaat yang diberikan oleh tanah.
3. Aset tetap tetap ini bersifat *non monetary*. Dalam artian manfaat yang dihasilkan dan bukan dari mengkonversi aset ini ke dalam sejumlah uang tertentu.
4. Pada umumnya manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi suatu periode yang lebih panjang dari satu tahun atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sangat beragam untuk membedakan antar aset-aset yang lain dengan aset tetap maka perlu untuk mengklasifikasikan aset tetap agar tidak tercampur dalam aset lainnya.

### 2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Skousen et. al (2005:429), klasifikasi dari aset tetap adalah:

#### 1. Aset tetap berwujud

Aset tetap berwujud memiliki bentuk fisik dan dengan demikian dapat diamati dengan satu alat atau lebih panca indera dan memiliki karakteristik umum, yaitu memberi manfaat ekonomi pada masa mendatang bagi perusahaan. Aset tertentu yang umum dilaporkan didalam kategori ini meliputi:

- a. Tanah, merupakan harta yang digunakan untuk tujuan usaha dan tidak dikenai penyusutan, maka biaya yang dikenakan pada tanah merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa manfaat yang tidak terbatas.
- b. Perbaikan Tanah, merupakan peningkatan kegunaan dari tanah tersebut. Unsur-unsur dari perbaikan tanah, seperti: pemetaan tanah, pengaspalan, pemagaran, saluran air, instalasi listrik, dan lain-lain.
- c. Bangunan, yang digunakan untuk menempatkan operasi perusahaan. Baik bangunan untuk kantor, *took*, pabrik, maupun gudang yang digunakan dalam kegiatan utama perusahaan. Akan tetapi bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan perusahaan yaitu bangunan yang belum jadi (dalam tahap pembangunan) tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.
- d. Mesin dan peralatan, merupakan aset yang dipergunakan perusahaan dalam proses produksi atau penyediaan jasa.
- e. Kendaraan, merupakan aset yang dipergunakan sebagai alat transportasi atau sebagai penyedia jasa dan lain-lain seperti truk, mobil, motor.

#### 2. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Bukti adanya aset ini terdapat dalam bentuk perjanjian, kontrak atau paten. Hal ini memenuhi definisi aset karena adanya manfaat mendatang.

Aset berikut umumnya dilaporkan aset tak berwujud:

- a. Paten, suatu hak eksklusif yang memungkinkan seorang penemu/pencipta untuk mengendalikan produksi, penjualan atau penggunaan dari suatu temuan/ciptaannya.
- b. Merk Dagang, suatu hak eksklusif yang mengizinkan suatu simbol, label dan rancangan khusus.
- c. Hak Cipta, suatu hak eksklusif yang mengizinkan seorang untuk menjual, memberi izin atau mengendalikan pekerjaannya.
- d. Goodwill, sumber daya, faktor dan kondisi tak berwujud lain yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba diatas laba normal dengan aset yang dapat diidentifikasi.

### **2.1.3 Perolehan dan Pencatatan Aset Tetap**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.4) paragraf 07 tercantum sebagai berikut :

“Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.”

Menurut Al. Haryono Jusup (2005:160), aset tetap yang ada diperusahaan dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

1. Pembelian tunai
2. Pembelian angsuran
3. Perolehan aset tetap dengan konstruksi sendiri

4. Pertukaran dengan aset lain
  - a. Pertukaran aset sejenis
  - b. Pertukaran aset tidak sejenis
5. Perolehan aset tetap dengan cara sewa guna usaha (*Leasing*)
  - a. Sewa guna usaha modal (*Capital Lease*)
  - b. Sewa guna usaha operasi (*Operating Leases*)

Menurut Raja Adri Satriawan (2012:152-168), bahwa cara untuk mendapatkan aset tetap adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembelian Tunai

Aset tetap yang beli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian tersebut, ditambah dengan biaya-biaya lain sehubungan pembelian tersebut.

Bila ada potongan harga atau diskon maka harus dikurangi dari nilai perolehan. Tetapi jika diskon tersebut tidak diambil maka perusahaan harus melaporkannya sebagai *discount lost*.

Jurnal pembayaran tunai:

Dr. Aset Tetap	xxx	
		Cr. Kas
		xxx

Jurnal pembayaran tunai jika diskon tidak diambil:

Dr. Aset Tetap	xxx	
		Dr. <i>Discount lost</i>
		xxx

Cr. Kas

xxx

## 2. Pembelian Angsuran

Ada kalanya suatu aset tetap dibeli secara angsuran. Dalam hal demikian, kontrak pembelian dapat menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam sekian kali angsuran dan terhadap saldo yang belum bayar dikenakan bunga. Pembelian secara kredit merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu aset. Akan tetapi dengan cara ini timbulah pembayaran yang akan diangsur guna melunasi hutang akibat pembelian kredit ini.

Jadi pencatatan yang harus dilaksanakan pada saat perolehan adalah:

Dr. Aset Tetap	xxx	
Cr. Hutang Usaha		xxx
Kas		xxx

Pencatatan pada saat pembayaran angsuran adalah :

Dr. Hutang Usaha	xxx	
Biaya Bunga	xxx	
Cr. Kas		xxx

## 3. Penerbitan Surat-surat Berharga

Aset tetap yang diperoleh melalui penerbitan surat berharga (misalnya penerbitan saham ataupun obligasi), maka harga dari aset tetap tidak bisa diukur secara tepat. Jadi dasar pencatatan yang mungkin digunakan adalah nilai pasar surat berharga yang diterbitkan. Jika nilai pasar dari surat berharga yang ditukarkan tidak dapat ditentukan, maka nilai pasar aset tetap itu harus ditentukan oleh

*appraisal* yang independen, dan dari hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar mencatat aset dan penerbitan surat berharga.

Jurnal yang dibuat jika laba:

Dr. Aset Tetap	xxx	
	Cr. Modal Saham/Obligasi	xxx
	Cr. Agio Saham	xxx

Jurnal yang dibuat jika rugi:

Dr. Aset Tetap	xxx	
Dr. Disagio	xxx	
	Cr. Modal Saham/Obligasi	xxx

#### 4. Pertukaran dengan Aset Lain

Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.9) paragraf 24 adalah :

“Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar kecuali:

- (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
- (b) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jenis pertukaran aset dapat dilakukan ke dalam dua macam kasus yaitu:

##### a. Pertukaran Aset Sejenis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset sejenis ini adalah sebagai berikut:

- Nilai pasar aset tetap yang dipertukarkan tidak diketahui,
- Aset tetap yang ditukarkan adalah jenis.

Pencatatan untuk transaksi pertukaran aset tetap sejenis ini adalah keuntungan dikurangkan pada harga aset tetap, sedangkan kerugian dibebankan dalam tahun berjalan. Contohnya pertukaran peralatan lama dengan peralatan baru.

Jurnal yang dibuat jika *gain* atau laba adalah:

Dr. Beban Penyusutan	xxx	
Cr. Akumulasi Penyusutan		xxx
Dr. Peralatan (baru)	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Peralatan (lama)		xxx
Kas		xxx

Jurnal yang dibuat jika *loss* atau rugi adalah:

Dr. Beban Penyusutan	xxx	
Cr. Akumulasi Penyusutan		xxx
Dr. Peralatan (baru)	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Kerugian Penyusutan	xxx	
Cr. peralatan (lama)		xxx
Kas		xxx

b. Pertukaran Aset Tidak Sejenis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset tidak sejenis adalah sebagai berikut:

- Aset yang dipertukarkan tidak sejenis,
- Aset tetap tersebut sejenis, tetapi tidak termasuk dalam *Producing Assets*,
- *Cost* kedua aset tersebut diketahui nilai pasarnya

Pencatatan untuk transaksi pertukaran aset tidak sejenis ini adalah keuntungan atau kerugian dibebankan dalam tahun berjalan. Contohnya pertukaran tanah dengan mesin.

Jurnal yang akan dibuat jika gain atau laba adalah:

Dr. Beban penyusutan	xxx	
		Cr. Akumulasi penyusutan
		xxx
Dr. Tanah	xxx	
		Akumulasi penyusutan
		xxx
		Cr. Mesin
		xxx
		Kas
		xxx
		Keuntungan dari pertukaran
		xxx

Jurnal yang akan dibuat jika loss atau rugi adalah:

Dr. Beban penyusutan	xxx	
		Cr. Akumulasi penyusutan
		xxx
Dr. Tanah	xxx	
		Akumulasi penyusutan aset tetap
		xxx
		Kerugian dari pertukaran
		xxx
		Cr. Mesin
		xxx
		Kas
		xxx

## 5. Perolehan Aset Tetap dengan Konstruksi Sendiri

Kadang kala aset tetap dibuat atau dirakit sendiri oleh perusahaan untuk digunakan sendiri. Aset tetap dicatat pada harga perolehannya, termasuk semua pengeluaran yang terjadi untuk membuat aset dan mempersiapkan aset tersebut untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Semua biaya yang dapat dikaitkan dengan konstruksi dapat dibebankan ke aset tersebut antara lain: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya konstruksi, biaya asuransi selama masa pembangunan, dan biaya kontraktor. Selain itu, biaya bunga atas pinjaman yang terjadi akibat pembiayaan pembangunan atau perakitan aset tersebut harus dimasukkan sebagai biaya perolehan aset.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.9) paragraf 22 mengemukakan :

“Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset untuk dijual. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Demikian pula jumlah abnormal yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset.”

Adapun alasan yang menjadi pendorong perusahaan untuk membangun atau membuat sendiri aset tetap yang diperlukan dalam kegiatan operasinya antara lain: untuk menekan biaya konstruksi



Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2011:30.1) paragraf 04, adalah:

**“Sewa** adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.”

Menurut Warren et. al (2005:511), pencatatan cara perolehan ini tergantung dari jenis *leasing* yang diambil oleh perusahaan. Ada dua cara sewa guna usaha, yaitu :

a. Sewa Guna Usaha Modal (*Capital Lease*)

Suatu sewa guna usaha diklasifikasi sebagai sewa guna usaha modal (*capital lease*) jika lease pada dasarnya dianggap telah membeli aset. Aset yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebagai aset tetap dalam kelompok tersendiri dan juga harus diamortisasikan. Kewajiban sewa guna usahanya pun disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. Biasanya cara ini diambil bila aset tetap disewa lebih dari dua tahun.

b. Sewa Guna Usaha Operasi (*Operating Lease*)

Lessee mencatat pembayaran menurut sewa guna usaha operasi dengan mendebit beban sewa dan mengkredit kas. Bila perusahaan memilih cara ini maka pencatatan angsuran tiap bulan tidak dianggap sebagai aset tetap tetapi langsung merupakan biaya sewa aset yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.

#### 2.1.4 Biaya Selama Masa Perolehan Aset Tetap

Menurut Soemarso S.R (2005:20), semua biaya yang terjadi untuk perolehan suatu aset tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan (*cost*) aset yang bersangkutan. Dengan demikian harga perolehan suatu aset tetap tidak terbatas pada harga belinya saja. Termasuk dalam harga perolehan adalah biaya pengiriman, asuransi, pemasangan, dan bea balik nama.

Sedangkan menurut Skousen et. al (2005:5), harga perolehan aset tetap semua jumlah dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap dan membuatnya siap digunakan adalah:

##### 1. Tanah

Karena tanah adalah aset yang tidak disusutkan, maka biaya yang dikenakan pada tanah haruslah biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa manfaat tanah yang tidak terbatas.

Biaya yang terkait dalam perolehan tanah, antara lain: harga pembelian, biaya pajak, biaya pembersihan, biaya peningkatan mutu tanah, biaya untuk memindahkan atau menghancurkan gedung yang tidak dibutuhkan, biaya perizinan dari badan-badan pemerintah, bea balik nama, biaya pengaspalan jalan.

##### 2. Bangunan

Harga perolehan bangunan termasuk biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi bangunan sebelum ditempati, biaya jasa arsitek, biaya jasa insinyur, biaya asuransi selama konstruksi, bunga atas pinjaman untuk membiayai, jalan setapak dan sekitar bangunan, perbaikan (pembelian bangunan bekas), restorasi (pembelian bangunan bekas), modifikasi untuk penggunaan, izin dari badan-badan pemerintah.

### 3. Mesin dan Peralatan

Harga perolehan peralatan meliputi biaya angkut dan asuransi selama mesin dan peralatan tersebut dalam perjalanan, dan biaya yang keluar untuk uji coba dan pemasangan, harga beli, pajak, perbaikan (pembelian peralatan dan mesin bekas), restorasi (pembelian peralatan dan mesin bekas), asuransi pengangkutan, biaya perakitan, modifikasi untuk penggunaan, izin dai badan-badan pemerintah.

### 4. Perbaikan Tanah

Harga perolehan perbaikan tanah meliputi biaya-biaya sebagai berikut: biaya pemetaan tanah, pengaspalan dan pemagaran, biaya perbaikan, pepohonan dan rerumputan, penerangan halaman, pengaspalan area parkir.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2011;16:2):

“Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan.”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2011;16:2) Komponen Biaya Perolehan meliputi:

- (a) harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
- (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset

tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Pencatatan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengeluaran Pendapatan (*Revenue Expenditures*)

Menurut Soemarso S.R. (2005:52), menjelaskan bahwa :

“Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat untuk tahun dimana pengeluaran tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pengeluaran pendapatan akan dicatat sebagai beban”.

Pengeluaran pendapatan itu meliputi :

a. Reparasi (*Repairs*)

Pengeluaran untuk memperbaiki *Fixed Asset* yang mengalami kerusakan sebagian atau seluruhnya, agar dapat dipergunakan dan menjalankan fungsinya lagi sebagaimana mestinya. Apabila sifat *repair* ini hanya mengembalikan *Fixed Asset* yang rusak menjadi seperti keadaan semula, tanpa mengadakan penggantian terhadap bagian-bagian tertentu dari *Fixed Asset* tersebut yang nilainya cukup besar, maka pengeluaran ini dibukukan sebagai biaya dan dicatat dalam perkiraan *Repair Expense*.

b. Pemeliharaan (*Maintanance*)

Pengeluaran untuk memelihara agar aset tetap yang bersangkutan tidak cepat usang atau rusak dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, *Maintanance* tidak secara langsung menaikan nilai *Fixed Asset* itu sendiri, maka pengeluaran ini dibukukan sebagai biaya dan dicatat dalam perkiraan *Repair Expense*.

c. Penggantian

Penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aset dengan unit baru yang tipenya sama, misalnya penggantian dinamo mesin. Penggantian seperti biasanya terjadi karena aset tetap lama sudah tidak berfungsi lagi (rusak). Penggantian bagian-bagian aset yang biayanya kecil diperlakukan dengan cara yang sama dengan reparasi kecil, yaitu diperlakukan sebagai beban. Apabila biayanya cukup besar, maka harga perolehan bagian itu dihapuskan dari rekening aset dan diganti dengan harga perolehan yang baru. Begitu juga akumulasi depresiasi untuk bagian yang diganti dihapuskan.

## 2. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditures*)

Menurut Soemarso S.R. (2005:52), menjelaskan bahwa :

“Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini.”

Pengeluaran modal ini meliputi :

- a. Reparasi besar dan mempunyai manfaat selama sisa umur penggunaan, tetapi tidak menambah umur penggunaannya. Pengeluaran ini adalah untuk memperbaiki aset tetap yang mengalami kerusakan sebagian atau seluruhnya, agar dapat menjalankan fungsinya kembali dengan mengadakan penggunaan dari bagian-bagian tertentu dari aset tersebut yang cukup besar.
- b. Reparasi besar yang menambah umur manfaat aset tetap  
Pengeluaran untuk reparasi ini adalah penggantian aset tetap yang disebabkan karena bagian yang diganti dalam keadaan rusak berat. Pengeluaran ini memberikan manfaat pada periode operasi di luar periode sekarang juga menambah umur penggunaan aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran ini tidak dibukukan sebagai biaya, tetapi dikapitalisasikan dengan mendebet perkiraan akumulasi penyusutan.
- c. Perbaikan (*Betterment/Improvement*)

Pengeluaran yang meningkatkan efisiensi atau kapitalisasi operasi aset tetap selama umur manfaatnya. Jika manfaatnya lebih dari satu periode akan dikapitalisir dalam *cost* aset.

d. Penambahan (*Addition*)

Suatu penambahan biasanya mengakibatkan bertambah besarnya fasilitas fisik. Penambahan dicatat dengan mendebet rekening aset yang mengalami penambahan aset pengeluaran tersebut, dan penyusutan selama umur ekonomis.

### 2.1.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.20) paragraf 67, menyatakan:

“Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) Dilepas; atau
- (b) Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.”

Aset dapat dihentikan dengan dijual, ditukarkan, atau dibiarkan. Penyusutan yang belum dicatat untuk periode tersebut dicatat pada tanggal pelepasan. Nilai buku pada saat penjualan dihitung sebagai selisih antara harga perolehan aset dan akumulasi penyusutan. Jika harga penghentian melebihi nilai bukunya, maka keuntungan. Jika harga penghentian kurang dari nilai bukunya, suatu kerugian. Menurut Soemarso S.R (2005:44-49), pemakaian aset tetap dapat dihentikan dengan cara-cara berikut:

1. Penghentian Aset melalui Penjualan

Apabila suatu aset tetap dijual, nilai bukunya dihitung sampai dengan tanggal penjualan. Nilai buku ini, kemudian dibandingkan dengan hasil penjualan yang diterima. Selisih yang diperoleh merupakan keuntungan atau kerugian karena penjualan aset tetap.

Contoh untuk mencatat penyusutan untuk tahun berjalan atas aset yang dijual jurnalnya adalah :

Dr. Beban Penyusutan	xxx
Cr. Akumulasi Penyusutan	xxx
Dr. Kas	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx
Cr. Keuntungan Penjualan Aset Tetap	xxx
Kendaraan	xxx

## 2. Penghentian Aset melalui Pertukaran

Apabila suatu aset tetap sudah berkurang manfaatnya, dapat ditukarkan dengan yang lain. Penukaran aset tetap dapat dilakukan dengan aset yang sejenis (misalnya mobil dengan mobil), atau dapat juga dilakukan dengan aset tetap yang tidak sejenis (misalnya mobil dengan mesin), dalam pertukaran (*trade-in*) aset tetap terlebih dahulu harus ditentukan nilai pasarnya (*trade-in allowance*). Selisih antara nilai tukar aset lama dengan harga aset baru merupakan jumlah yang harus dibayar. Selisih antara nilai tukar dan nilai buku merupakan keuntungan atau kerugian dari penukaran. Apabila nilai tukar lebih besar dari pada nilai buku, maka diperoleh keuntungan. Sebaliknya apabila nilai tukar lebih kecil dari pada nilai buku, pertukaran tersebut mendatangkan kerugian.

Ada dua cara untuk pencatatan untuk transaksi pertukaran aset, yaitu :

- Untuk pertukaran aset tidak sejenis, keuntungan atau kerugian dibebankan dalam tahun berjalan.

Contoh untuk mencatat penyusutan tahun berjalan atas aset yang ditukar jurnalnya jika mendapat keuntungan adalah :

Dr. Beban Penyusutan – Mesin	xxx
Cr. Akumulasi Penyusutan – Mesin	xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan – Mesin	xxx	
Perlengkapan	xxx	
Cr.    Mesin		xxx
Keuntungan pertukaran		xxx
Kas		xxx

Contoh jurnal jika mendapat kerugian adalah :

Dr. Beban Penyusutan – Mesin	xxx	
Cr.    Akumulasi Penyusutan		xxx
Dr. Perlengkapan	xxx	
Akumulasi penyusutan – Mesin	xxx	
Kerugian pertukaran	xxx	
Cr.    Mesin		xxx
Kas		xxx

- b. Untuk pertukaran aset sejenis, sering kali peralatan lama ditukar dengan yang baru, yang dimiliki kegunaan sama. Dalam kasus semacam ini, pembeli menerima peralatan lama yang dimaksud dari penjual. Jumlah ini, yang dinamakan dengan nilai tukar tambah (*trade-in allowance*), mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari pada nilai buku peralatan lama. Saldo yang tersisa, jumlah yang terutang, dapat dibayarkan tunai atau dicatat sebagai suatu kewajiban, selisih ini biasanya dinamakan dengan sisa yang terutang (*boot*).

Contoh jurnalnya adalah :

Dr. Beban Penyusutan – Mesin	xxx	
Cr.    Akumulasi Penyusutan – Mesin		xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan – Mesin	xxx	

Mesin (baru)	xxx
Cr. Mesin (lama)	xxx
Keuntungan pertukaran	xxx
Kas	xxx

### 3. Penghapusan Aset Tetap

Kemungkinan lain bagi aset tetap yang sudah tidak bermanfaat adalah dihapuskan. Ini terjadi apabila aset tetap tidak dapat dijual atau ditukarkan. Apabila aset tetap belum disusutkan penuh maka akibatnya penghapusan ini adalah terjadinya kerugian sebesar nilai buku. Apabila mesin diatas dihapuskan maka ayat jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut :

Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
Kerugian penghapusan aset tetap	xxx
Cr. Mesin	xxx

## 2.2 Penyusutan Aset Tetap

Menurut Warren et. al (2005:495), jenis aset tetap kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan (*depreciation*).

### 2.2.1 Pengertian Penyusutan

Pengertian penyusutan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2011:16:3) paragraf 6, yaitu:

“Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”.

Pengertian penyusutan menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:173), yaitu:

“Penyusutan adalah alokasi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat yang estimasi. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut dikurangi dengan estimasi nilai sisa (*salvage value*) aset tersebut pada “akhir masa manfaatnya”.

Sedangkan menurut Dwi Martani, dkk (2012:313), menerangkan bahwa:

“Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah suatu metode pengalokasian harga perolehan aset setelah dikurangi nilai sisa yang dialokasikan ke periode-periode yang menerima manfaat dari aset tetap tersebut. Jumlah penyusutan menunjukkan bahwa penyusutan bukan merupakan suatu proses pencadangan, melainkan proses pengalokasian harga perolehan aset tetap.

Ada faktor yang menyebabkan kenapa aset tetap harus disusutkan yaitu:

a. Faktor Fisik

Penyusutan dilakukan karena keadaan fisik aset tetap yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal tersebut tidak dapat dihindari meskipun perawatannya dilakukan dengan baik. Faktor fisik menyebabkan aset tetap menjadi aus karena pemakaiannya, bertambahnya umur serta adanya kerusakan-kerusakan yang timbul.

b. Faktor fungsional

Faktor fungsional menyebabkan fungsi aset tetap tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya ketidak mampuan aset dalam memenuhi produksi dibanding dengan aset sejenis lainnya dalam keadaan yang sama.

## **2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan Biaya Penyusutan**

Terdapat tiga faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan tahunan yang tepat menurut Skousen et. al (2005:105), yaitu :

### **1. Harga Perolehan Aset Tetap (*Cost*)**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:16.6) paragraf 16 dan 17 dalam Standar Akuntansi Keuangan, bahwa:

“Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- (a) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
- (b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intense manajemen;
- (c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Harga perolehan suatu aset meliputi semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan persiapan penggunaan aset tersebut. Harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, jika ada, adalah harga perolehan yang dapat disusutkan atau dasar penyusutan, yaitu jumlah harga perolehan aset yang akan dibebankan pada periode-periode mendatang.

## **2. Nilai Residu atau Nilai Sisa (*Residual Value*)**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:16.3) paragraf 6 dalam Standar Akuntansi Keuangan, bahwa:

“Nilai residu aset adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.”

Nilai sisa (residu) suatu aset adalah perkiraan harga penjualan aset pada saat aset tersebut dijual setelah dihentikan pemakaiannya. Nilai sisa tergantung pada kebijaksanaan penghentian aset dalam perusahaan serta keadaan pasar.

## **3. Umur Ekonomis atau Masa Manfaat**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.4) paragraf 06, adalah:

“Umur manfaat adalah :

- (a) Periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas, atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas.”

Aset operasi tidak lancar selain tanah memiliki masa manfaat yang terbatas sebagai akibat dari faktor fisik dan fungsional. Faktor fisik yang membatasi masa manfaat suatu aset adalah: kerusakan,

keausan, kehancuran. Kerusakan pada penggunaan aset tetap seperti mobil, gedung, atau furnitur yang menyebabkan aset tersebut tidak dapat digunakan kembali. Aset berwujud, baik dipakai atau tidak, kadang kala hancur karena usia. Terakhir, kebakaran, banjir, gempa, dan kecelakaan dapat menghentikan masa manfaat dari suatu aset.

Faktor fungsional utama yang membatasi masa manfaat aset adalah keusangan. Suatu aset dapat kehilangan kegunaannya sebagai akibat dari perubahan dalam kebutuhan dunia usaha atau kemajuan teknologi, sehingga tidak dapat lagi menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk dijadikan alasan dari penggunaan aset tersebut. Meskipun aset tersebut secara fisik masih dapat dipergunakan, ke tidak mampunya menghasilkan pendapatan yang memadai telah memperpendek masa manfaatnya.

### 2.2.3 Metode Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.18) paragraf 63, dijelaskan bahwa:

“Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya.”

Sedangkan menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:174), menjelaskan bahwa penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

- a) Berdasarkan waktu
  - (i) Metode garis lurus (*straight line method*)
  - (ii) Metode pembebanan menurun (*decreasing charge methods*)
    - Metode saldo menurun (*declining balance method*)
    - Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*)
- b) Berdasarkan penggunaan
  - (i) Metode jam jasa (*service hours method*)

(ii) Metode jumlah unit (*productive output method*)

Dari berbagai macam metode di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1) Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode garis lurus mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dalam jumlah yang sama besar selama estimasi masa manfaatnya. Beban penyusutan setiap tahunnya dapat dihitung dengan mengalikan tarif penyusutan dengan dasar penyusutan. Dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai sisanya. Secara matematis beban penyusutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimasi manfaat (dalam tahun)}}$$

Jurnal untuk mencatat penyusutan tiap tahun adalah:

Dr. Beban Penyusutan	xxx	
		Cr. Akumulasi depresiasi
		xxx

Contoh perhitungan:

Suatu perusahaan membeli kendaraan tetap seharga Rp. 12.500.000. (sudah termasuk bea balik nama dan lain-lain). Nilai sisa diperkirakan sebesar Rp. 1.550.000. Umur peralatan tersebut diperkirakan 5 tahun.

Penyusutan tiap tahun dihitung sebagai berikut:

Rp 12.500.000 – Rp. 1.550.000

Penyusutan per tahun = \_\_\_\_\_

5

= Rp 2.190.000

Beban penyusutan pertahun dicatat sebagai berikut:

Dr. Beban penyusutan Rp 2.190.000

Cr. Akumulasi penyusutan Rp 2.190.000

Harga perolehan, beban penyusutan per tahun, akumulasi penyusutan dan nilai buku kendaraan tersebut selama 5 tahun tampak pada dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**Beban Penyusutan per Tahun Kendaraan**

**Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Perolehan</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun</b>
1	Rp 12.500.000	Rp 2.190.000	Rp 2.190.000	Rp 10.340.000
2	Rp 12.500.000	Rp 2.190.000	Rp 4.380.000	Rp 8.120.000
3	Rp 12.500.000	Rp 2.190.000	Rp 6.570.000	Rp 5.930.000
4	Rp 12.500.000	Rp 2.190.000	Rp 8.760.000	Rp 3.740.000
5	Rp 12.500.000	Rp 2.190.000	Rp 10.950.000	Rp 1.550.000

## 2) Metode Pembebanan Menurun (*Decreasing Charge Methods*)

Metode pembebanan menurun yang dikenal juga dengan sebutan metode penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation methods*) membebankan penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah pada tahun-tahun akhir.

### a. Metode Saldo Menurun (*Declining Balanced Method*)

Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan periodik yang semakin menurun sepanjang umur estimasi aktiva itu. Teknik yang paling umum adalah dengan melipat gandakan tarif penyusutan (diekspresikan sebagai persentase) garis lurus, yang dihitung tanpa memperhatikan nilai residu, dan menggunakan tarif penyusutan yang dihasilkan terhadap harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Tarif saldo menurun tetap konstan dan diaplikasikan pada nilai buku yang menghasilkan nilai penyusutan yang terus menurun setiap tahunnya. Proses ini terus berlangsung hingga nilai buku aktiva berkurang mencapai estimasi nilai sisanya, dimana pada saat tersebut penyusutan akan dihentikan. Tarif saldo menurun berganda untuk aktiva 5 tahun akan menjadi 40% (dua kali tarif garis lurus,  $20\% \times 2 = 40\%$ ).

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Periode}$$

Tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus.

Contoh Perhitungan:

Harga perolehan Rp 500.000,- dengan taksiran nilai residu Rp 50.000,-  
Umur ekonomis 5 tahun dan tarif pajak 40%.

$$\begin{aligned} \text{beban penyusutan tahun pertama} &= 40\% \times \text{Rp } 500.000 \\ &= \text{Rp } 200.000,- \end{aligned}$$

Jurnal penyusutan tahun pertama adalah:

Dr. Beban penyusutan Rp 200.000,-

Cr. Akumulasi penyusutan Rp 200.000,-

Beban penyusutan kedua =  $40\% \times (\text{Rp } 500.000 - \text{Rp } 200.000)$

= Rp 120.000,-

Jurnal penyusutan tahun kedua adalah:

Dr. Beban penyusutan Rp 120.000,-

Cr. Akumulasi penyusutan Rp 120.000,-

Jika disusun dalam bentuk tabel, maka perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

**Tabel Tabel 2.2**

**Beban Penyusutan per Tahun**

**Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balanced Method*)**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Buku</b>	<b>Tarif Saldo Menurun</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun</b>
1	Rp 500.000	40%	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 300.000
2	Rp 300.000	40%	Rp 120.000	Rp 320.000	Rp 180.000
3	Rp 180.000	40%	Rp 72.000	Rp 392.000	Rp 108.000
4	Rp 108.000	40%	Rp 43.200	Rp 435.200	Rp 64.800
5	Rp 64.800	40%	Rp 14.800	Rp 450.000	Rp 50.000

\*berdasarkan dua kali garis lurus sebesar 20%

**( $90.000/450.000 = 20\%$ ;  $20\% \times 2 = 40\%$ )**

**b. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of The Years Digits Method*)**

Metode ini merupakan metode depresiasi yang dihasilkan dari penghapusbukuan yang bersifat menurun dimana biaya depresiasi tahunan ditentukan dengan mengalikan biaya depresiasi dengan fraksi tahun sebagai tarif pembebanan depresiasi. Tarif pembebanan depresiasi merupakan rasio dengan dominatornya adalah jumlah tahun pengguna aset (misalnya aset dengan masa manfaat 5 tahun memiliki denominator 15 ( $5 + 4 + 3 + 2 + 1$ ) dan numeratornya adalah jumlah tahun sisa pada awal tahun yang belum didepresiasi.

Dengan metode ini, fraksi pengali pada metode ini numerator tersebut akan menurun seiring waktu dan denominator tersebut akan menurun seiring waktu dan denominatornya tetap ( $5/15, 4/15, 3/15, 2/15,$  dan  $1/15$ ). Pada akhir masa manfaat aktiva, saldo yang tersisa harus sama dengan nilai sisa.

Beban penyusutan = Tarif penyusutan x (Harga Perolehan – Nilai Sisa)

Contoh:

Perhitungan dari data yang diperkirakan dengan harga perolehan Rp 450.000,00 dan umur ekonomis selama 5 tahun telah disajikan pada tabel 2.3 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Beban Penyusutan per Tahun**  
**Metode Penyusutan Angka Tahun (*Sum of The Years Digits Method*)**

<b>Tahun</b>	<b>Dasar Penyusutan</b>	<b>Umur yang Tersisa dalam Tahun</b>	<b>Pecahan Penyusutan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun</b>
1	450.000	5	5/15	150.000	300.000

2	450.000	4	4/15	120.000	180.000
3	450.000	3	3/15	90.000	90.000
4	450.000	2	2/15	60.000	30.000
5	450.000	1	1/15	30.000	0*
<b>Jumlah</b>			15/15	450.000	

\* Nilai sisa

### 3) Metode Jam Jasa (*service hours method*)

Metode jam jasa membebankan penyusutan untuk suatu periode berdasarkan jumlah jam yang digunakan oleh suatu aset dalam memberikan jasa dalam rangka operasi perusahaan selama periode tersebut. Tarif penyusutan per jam diperoleh dengan cara membagi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dengan estimasi masa manfaat aset tersebut dalam jam. Secara matematis, tarif penyusutan per jam dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Biaya Perolehan – Nilai Sisa

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Biaya Perolehan – Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Masa Manfaat dalam Jam}}$$

Contoh Perhitungan:

Asumsikan bahwa biaya perolehan aset Rp 5.000.000, nilai sisa Rp 1.000.000, diestimasi dapat digunakan selama 20.000 jam. Dengan demikian, tarif penyusutan per jam aset tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

Rp 5.000.000 – Rp 1.000.000

$$\begin{aligned} \text{Tarif Penyusutan} &= \frac{\text{Rp 5.000.000 – Rp 1.000.000}}{20.000 \text{ jam}} \\ &= \text{Rp 200 per jam} \end{aligned}$$

Seandainya aset tersebut dioperasikan 3.000 jam pada tahun pertama, 8.000 jam pada tahun ke dua, 5.000 jam pada tahun ke tiga, dan 4.000 jam pada tahun ke empat maka beban penyusutan pada tahun-tahun tersebut dapat dihitung seperti skedul berikut:

**Tabel 2.4**

**Beban Penyusutan per Tahun**  
**Metode Jam Jasa (*service hours method*)**

Tahun	Jam Jasa	Tarif	Beban Penyusutan	Nilai Tercatat
0				Rp 5.000.000
1	3.000	Rp 200	Rp 600.000	Rp 4.400.000
2	8.000	Rp 200	Rp 1.600.000	Rp 2.800.000
3	5.000	Rp 200	Rp 1.000.000	Rp 1.800.000
4	4.000	Rp 200	Rp 800.000	Rp 1.000.000
Jumlah			Rp 4.000.000	

**4) Metode Jumlah Unit Produksi (*productive output method*)**

Metode jumlah unit produksi membebankan penyusutan untuk suatu periode berdasarkan jumlah unit yang diproduksi oleh suatu aset dalam operasi perusahaan selama periode tersebut. Tarif penyusutan per unit diperoleh dengan cara membagi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dengan estimasi total unit yang dapat diproduksi oleh suatu aset selama masa manfaatnya. Secara matematis, tarif penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Total Unit Produksi}}$$

Contoh Perhitungan:

Asumsikan bahwa harga perolehan Rp 10.000.000 dan nilai sisa Rp 1.000.000. Diestimasi dapat menghasilkan 20.000 unit produk selama masa manfaatnya. Dengan demikian, tarif penyusutan per unit aset tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 1.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{Tarif Penyusutan} &= \frac{\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 1.000.000}{20.000 \text{ unit}} \\ &= \text{Rp } 450 \text{ per unit} \end{aligned}$$

Seandainya aset tersebut dioperasikan 3.000 unit pada tahun pertama, 8.000 unit pada tahun ke dua, 5.000 unit pada tahun ke tiga, dan 4.000 unit pada tahun ke empat maka beban penyusutan pada tahun-tahun tersebut dapat dihitung seperti skedul berikut:

**Tabel 2.5**

**Beban Penyusutan per Tahun**

**Metode Jumlah Unit Produksi (*productive output method*)**

<b>Tahun</b>	<b>Unit Produksi</b>	<b>Tarif</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>Nilai Tercatat</b>
0				Rp 5.000.000
1	3.000	Rp 200	Rp 600.000	Rp 4.400.000
2	8.000	Rp 200	Rp 1.600.000	Rp 2.800.000
3	5.000	Rp 200	Rp 1.000.000	Rp 1.800.000
4	4.000	Rp 200	Rp 800.000	Rp 1.000.000
Jumlah			Rp 4.000.000	

## **2.3 Penyusutan Aset Tetap Menurut Perpajakan**

### **2.3.1 Pengertian Rekonsiliasi**

Menurut Waluyo (2010:61) menjelaskan bahwa dalam praktek di Indonesia, pada umumnya perusahaan bisnis menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh IAI dan menyusun laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan secara ekstra komptable melalui proses rekonsiliasi.

Rekonsiliasi itu sendiri merupakan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Perbedaan utama antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, tahun pajak atau tahun buku, metode akunting yang digunakan dan doktrin serta konsep yang menjadi acuannya. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti penggelapan pajak, tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kadang-kadang menyimpang dari prinsip pengukuran penghasilan yang benar dengan tujuan untuk mendorong perilaku ekonomi tertentu atau pemberian subsidi kepada aktivitas tertentu. Laporan keuangan komersial yang dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan, namun dilain pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai wajib pajak, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.3.2 Perbedaan Waktu**

Menurut Waluyo (2010:103), pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan

atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil dengan sendirinya pada saat lampainya waktu tersebut. Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan penghapusan piutang tak tertagih fiskal, metode penilaian persediaan serta metode penyusutan dan amortisasi. Berikut hanya akan dijelaskan tentang metode penyusutan.

### 2.3.3 Metode Penyusutan

Menurut Waluyo (2010:120), penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial berbeda dengan penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Metode penyusutan menurut kepentingan akuntansi didesain untuk mempersandingkan antara pengeluaran investasi modal dengan penghasilan sesuai prosedur investasi. Periode penyusutan atau masa manfaat yang digunakan untuk kepentingan perpajakan didasarkan tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak ada usaha untuk mempersandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran.

Menurut Warren et. al (2005:502), sistem penyusutan fiskal disebut *Accelerated Cost Recovery System (ACRS)* yang berlaku sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994, dan kemudian tahun 1995 sampai sekarang menggunakan sistem *Modified Accelerated Cost Recovery (MACRS)* yang terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai Modifikasi Sistem Pengembalian Biaya Dipercepat. Sedangkan untuk metode penyusutannya dibatasi pada Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), Metode Saldo Ganda Menurun (*Double Declining Balance Method*), dan Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*).

Format sistem MACRS ini secara garis besar dilakukan sebagai berikut:

1. Aset berwujud/aset tidak berwujud perusahaan dibagi-bagi dalam kelompok bangunan dan bukan bangunan dan amortisasi. Kelompok bangunan dipisahkan lagi antara kelompok bangunan yang sifatnya permanen dan bangunan tidak permanen. Sedangkan kelompok bukan bangunan dirinci lagi atas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
2. Masing-masing kelompok aset berwujud ditetapkan pula masa manfaatnya, yaitu dimulai dengan masa manfaat 20 tahun bangunan permanen dan 10 tahun untuk bangunan tidak permanen. Sedangkan untuk aset bukan bangunan masa manfaatnya, ditetapkan 4 tahun untuk kelompok 1, 8 tahun untuk kelompok 2, 16 tahun untuk kelompok 3, dan 20 tahun untuk kelompok 4.
3. Wajib pajak dapat memilih, apakah akan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo ganda menurun tergantung pada kebijakan perusahaan, dengan catatan tarifnya pun telah ditetapkan seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**

**Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud  
Menurut Peraturan Perpajakan**

Kelompok Aset Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Ganda Menurun
<b>Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Jenis-jenis aset tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok 1 untuk semua jenis usaha adalah mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, komputer, *printer* dan sejenisnya, perlengkapan lainnya seperti *tape recorder*, *televise*, *amplifier* dan sejenisnya, sepeda motor, sepeda, becak alat dapur untuk memasak, makan dan minum.

Jenis-jenis aset tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok 2 untuk semua jenis usaha adalah mabel dan peralatan dari logam, alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya, mobil, bus truk, *speed boat* dan sejenisnya, kontainer dan sejenisnya.

Jenis-jenis aset tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok 3 merupakan jenis-jenis aset yang digunakan dalam perusahaan/jenis usaha tertentu, yaitu untuk jenis usaha pertambangan (selain minyak dan gas), industri garmen, perkayuan, industri kimia, industri mesin, perhubungan komunikasi dan telekomunikasi. Sedangkan untuk kelompok 4, yaitu jenis-jenis aset yang digunakan dalam perusahaan/jenis usaha konstruksi, perhubungan dan komunikasi.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE TUGAS AKHIR**

#### **3.1 Objek Tugas Akhir**

Objek dalam tugas akhir ini adalah **“Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I”**, yang berlokasi di Jalan P.H.H Mustofa No.39 Bandung.

##### **3.1.1 Sejarah PT. Jamsostek (Persero)**

Sejak tahun 1977, dasar hukum terhadap pelaksanaan jaminan sosial yang disebut dengan program ASTEK telah diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1977. Program tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang memiliki sekurang-kurangnya 100 orang staf dan dengan pembayaran gaji per bulan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,-. Untuk menata dan mengembangkan program ASTEK, perusahaan ASTEK dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1977. Pada tahun 1990, suatu rancangan perawatan kesehatan telah ditambahkan ke dalam program sebelumnya dan diberikan kepada tenaga kerja serta keluarga mereka. Pelaksanaan rancangan ini masih secara sukarela sampai tahun 1992.

Dasar hukum yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 bahwa implementasi program kecelakaan kerja pada ASTEK adalah didasarkan pada Undang-undang No.2 tahun 1951. Menurut UU tersebut, kecelakaan saat bekerja merupakan tanggung jawab dari perusahaan. masalahnya adalah bahwa UU No. 2 tahun 1951 perlu diperbaharui untuk dapat menjamin setiap orang yang bekerja pada bermacam-macam industri termasuk mereka yang menderita penyakit yang disebabkan oleh pekerja.

Implementasi ASTEK yang dilandaskan menurut sistem asuransi telah demikian baik namun pelaksanaan ASTEK bagi perusahaan sebagai pembebanan pajak yang berarti bahwa perusahaan diwajibkan untuk membayar iuran ASTEK atas nama karyawan. Pengaruh untuk melindungi karyawan mereka setidaknya pada saat bekerja, kematian sebelum umur 55 tahun dan tabungan minimal.

Pada tahun 1992, upaya ASTEK dikembangkan lagi menjadi jaminan sosial tenaga kerja, disebut juga JAMSOSTEK. Pelaksanaan program JAMSOSTEK berdasarkan pada undang-undang No. 3 tahun 1992. Hal ini merupakan pengembangan kembali program ASTEK dalam rancangan pemeliharaan kesehatan wajib pada program yang sudah ada. Undang-undang mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang tenaga kerja atas membayar gaji bulanan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- harus masuk JAMSOSTEK. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan didasarkan pada suatu sistem pemberian pelayanan kesehatan dimana ASTEK akan melakukan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit yang akan dilaksanakan sebagai *Hospital Maintenance Operation* (Operasi Pemeliharaan Rumah Sakit) untuk pemeriksaan pelayanan kesehatan bagi para anggota. Selain itu JAMSOSTEK telah menjadi bagian dari kebijakan kesehatan yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para tenaga kerja serta keluarga mereka.

Terdapat juga bentuk hukum perusahaan yang telah digunakan berdasarkan UU No. 9 tahun 1969. Yang pertama adalah Perusahaan Jawatan (PerJan) dimana pembiayaan pada jawatan ini didanai secara terpusat oleh anggaran Negara dan merupakan bagian dari unit departemen pemerintahan terkait. Yang kedua adalah Perusahaan Umum (Perum) yang digunakan untuk melayani sarana kepentingan umum yang operasinya dikelola secara terpisah dari departemen pemerintah terkait. Ketiga adalah Persero yang menunjukkan status kepemilikan perusahaan Negara yang 100% saham perusahaan. Perubahan bentuk hukum perusahaan dari Perum

menjadi Persero merupakan masalah swastanisasi dari perusahaan milik Negara (BUMN) yang dimulai tahun 1992. Di Indonesia, perusahaan milik Negara (BUMN) memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan keuangan kepada yang membutuhkan secara harus mampu untuk bersaing dengan sektor swasta.

Pada tahun 1990, Perum ASTEK (Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja) diubah menjadi Persero berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1450/kmk.013 tahun 1990. Perubahan bentuk hukum perusahaan khususnya dari Perum ke Persero dimulai pada tahun 1990-an pada saat pemerintah menyatakan swastanisasi dari perusahaan milik Negara untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Pada tahun 1995, nama PT. ASTEK (Persero) sebagai badan pengelola program-program JAMSOSTEK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1995 diusulkan untuk diubah menjadi PT. JAMSOSTEK (Persero). Sejak 31 Agustus, JAMSOSTEK telah secara resmi digunakan diseluruh Indonesia.

Kejadian sejarah di atas menunjukkan bahwa perubahan struktural dari bentuk hukum organisasi jaminan sosial di Indonesia memiliki hubungan erat dengan prestasi makro ekonomi. Salah satu reformasi makro ekonomi Indonesia adalah swastanisasi dari pengelolaan perusahaan pemerintah pada tahun 1992, yang kemudian diikuti dengan swastanisasi pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja. Maksud dari perubahan tersebut menjadi Persero adalah didasarkan pada era deregulasi serta swastanisasi perusahaan milik Negara yang dinyatakan oleh pemerintah pada tahun 1990-an dimana keuntungan dari perubahan tersebut adalah tergantung pada tingkat otonomi yang tinggi, untuk melaksanakan efisiensi dalam mengelola sumber daya mereka serta dana lebih banyak untuk peningkatan kinerja perusahaan.

Swastanisasi dari perusahaan milik Negara dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan dalam jenis-jenis serta pelayanan yang mampu terhadap para anggotanya. Pengaruh swastanisasi pada perusahaan milik

Negara adalah bahwa sekarang ini tidak ada lagi perusahaan Negara yang bentuk hukumnya sebagai Perusahaan Jawatan atau Perusahaan Umum.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak *normative* tenaga di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. JAMSOSTEK (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hati Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarga.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetap juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

## **3.2 Gambaran Umum PT. Jamsostek (Persero)**

### **3.2.1 Kegiatan Fungsi dan Tugas Pokok PT. Jamsostek (Persero)**

PT. Jamsostek (Persero) secara nasional bergerak dalam bidang Jasa Jaminan Sosial bagi para Tenaga Kerja di Indonesia. Adapun program pelayanan yang diberikan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hati Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), yang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993,

Keputusan Presiden RI Nomor XXII Tahun 1993, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-05/MEN/1993, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-196/MEN/1999. Perusahaan ini mulai beroperasi tanggal 5 Desember 1978 yang semula bernama PERUM ASTEK (Perusahaan Umum Asuransi Tenaga Kerja).

PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I merupakan salah satu bagian Kantor Cabang dari 112 Kantor Cabang diseluruh Indonesia. Adapun tentang keberadaan perusahaan ini adalah sebagai berikut:

Nama perusahaan : PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor  
Cabang Bandung I  
Kepala Kantor Cabang : H. Dadang Koesnadi  
Status : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Alamat : Jl. PHH. Mustopa No. 39 Bandung  
Telepon / Fax : (022) 7102733, 7204486 / (022) 7275570

PT. Jamsostek Kantor Cabang Bandung I secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah IV Jawa Barat & Banten sebagai koordinator operasional di Tingkat Propinsi Jawa Barat & Banten, serta kepada direksi PT. Jamsostek (Persero) yang berada di Kantor Pusat di Jalan Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan. PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I dalam aktivitas memberikan pelayanan jasa berorientasi kepada perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta Jamsostek dan kepada tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta.

Fungsi dasar tugas pokok PT. Jamsostek Cabang Bandung adalah:

1. Kantor Cabang dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah
2. Kantor Cabang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan serta memberikan laporan-laporan secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah
3. Melakukan kegiatan operasi yang meliputi penataan potensi kepesertaan
4. Melakukan administrasi dan pemutakhiran data kepesertaan
5. Membina hubungan baik dengan mitra kerja
6. Melakukan MTP (Memberikan Pelayanan Terbaik)

### **3.2.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menguraikan struktur dan tugas organisasi PT. Jamsostek Cabang Bandung I, sebagai berikut:

Kepala Kantor Cabang merupakan pimpinan tertinggi pada PT. Jamsostek Cabang Bandung I yang membawahi:

- a. Kepala Bidang Pemasaran
- b. Kepala Bidang Pelayanan
- c. Kepala Bidang Teknologi dan Informasi
- d. Kepala Bidang Keuangan
- e. Kepala Bidang Personalia dan Umum
- f. Kepala Bidang Program Khusus
- g. Kepala Bidang JPK

#### **1. Kepala Kantor Cabang**

Uraian tugas Kepala Cabang adalah:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran
- b. Merencanakan kegiatan kerja untuk pencapaian kinerja Kantor Cabang

- c. Merencanakan dan mengarahkan penyusutan peta potensi kepesertaan dan penyebaran PPK untuk tercapainya target pemasaran
- d. Mengarahkan dan mengendalikan keselenggaranya pelayanan peserta perusahaan dan PPK
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mitra dalam rangka perluasan, pembiayaan, kepesertaan, dan peningkatan pelayanan.

## 2. Kepala Bidang Pemasaran

Tugasnya adalah memperoleh data potensi kepesertaan, mengendalikan kegiatan petugas lapangan, menjamin tercapainya target kepesertaan dan iuran, kontinuitas iuran Jamsostek, pengarsipan data peserta tahun berjalan, membuat laporan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pemasaran dibantu oleh:

a. *Account Officer*, tugasnya:

- Menyusun rencana kegiatan perluasan kepesertaan sesuai target
- Menyusun dan melakukan rencana pembebanan terhadap perusahaan binaan
- Membuat dan mengirim SSP yang dilampiri F1
- Meneliti dokumen pendaftaran kepesertaan atau tenaga kerja, upah tenaga kerja, menghitung dan menerbitkan penetapan iuran.

b. PAP (Petugas Administrasi Pemasaran).

## 3. Kepala Bidang Pelayanan

Tugasnya adalah Mengendalikan kegiatan petugas pelayanan, menyelesaikan tugas klaim pending dan hutang jaminan, menandatangani penetapan jaminan kurang dari Rp. 15.000.000,-, menyelesaikan amalgamasi, dan membuat laporan.

Kepala bidang pelayanan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. *Customer Service*, tugasnya:

- Memberikan pelayanan informasi program jamsostek dan menerima keluhan peserta untuk meningkatkan mutu pelayanan menjadi lebih baik.
- Menerima dokumen, meneliti kelengkapan, dan keabsahan dokumen pendaftaran, dokumen pembayaran iuran dan dokumen pengajuan pembayaran jaminan untuk menjamin pelayanan yang baik dan benar.
- Menerima dan memeriksa dokumen permintaan koreksi sertifikat, KPJ dan PS/JHT.

b. Verifikator Jaminan (JKK dan JPK), tugasnya:

- Menerbitkan surat konfirmasi tahap 1 dan pengecekan data atau kasus yang dianggap meragukan sebagai bahan penyesuaian penetapan jaminan.
- Membuat *voucher* dan klaim JKK dan JPK (pembayaran transfer).

c. Administrasi Amalgamasi, tugasnya:

- Memenuhi pengajuan amalgamasi dari cabang lain
- Membuat permintaan amalgamasi ke cabang lain untuk penggabungan saldo JHT
- Menggabungkan saldo JHT untuk klaim
- Membuat rekening antara amalgamasi.

#### **4. Kepala Bidang Teknologi dan Informasi**

Tugasnya adalah menjamin kelancaran aplikasi kepesertaan, iuran dan jaminan, merancang dan membuat aplikasi pelayanan, membuat hutang JHT, dan membuat laporan.

Kepala bidang teknologi dan informasi dalam melakukan tugasnya dibantu oleh:

a. *Data Administrator*, tugasnya:

- Melakukan pemeliharaan dan penjagaan keamanan *database*
- Melakukan pengiriman data kepesertaan, iuran dan jaminan ke kantor pusat
- Mengatur kewenangan pemakaian sistem
- Melakukan *back up* untuk kelangsungan operasional (*back up, security dan recovery*)

b. *Data Operator*, tugasnya:

- Merekam dan mengolah atau mengkonversi seluruh data-data
- Menerbitkan hasil proses data kepesertaan
- Melakukan distribusi keluaran (*output*)

c. *Technical Support*, tugasnya:

- Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas komputer berupa *hardware, software*, dan jaringan untuk memastikan pemakaian yang optimal.
- Memelihara dan mengamankan dokumen sistem (buku panduan, buku petunjuk).

## 5. Kepala Bidang Keuangan

Tugasnya adalah menerbitkan maraca perolehan kantor cabang, menandatangani cek, bilyet giro untuk pembayaran bersama kepala kantor cabang dan pejabat yang ditunjuk, pengendalian anggaran, menandatangani voucher iuran, dan membuat laporan.

Kepala bidang keuangan, tugasnya:

a. Verifikator Akuntansi, tugasnya:

- Melakukan verifikasi atas semua bukti transaksi keuangan
- Melakukan pencatatan atas segala jenis transaksi penerimaan maupun pengeluaran

b. Kasir, tugasnya:

- Mengelola dan memastikan tersedianya uang dalam bentuk tunai
  - Membuat cek/bilyet giro untuk internal maupun eksternal
  - Meneliti dan memastikan kebenaran pembayaran tunai
- c. Pembukuan, tugasnya:
- Melakukan penerimaan iuran via Bank
  - Membukukan data
  - Meminta persejutan *voucher* pembayaran
  - Mencetak *listing unaudited* secara harian
- d. Verifikator Anggaran dan Pajak, tugasnya:
- Melakukan penyusutan rencana kerja dan anggaran serta memonitor pelaksanaannya
  - Melakukan administrasi perpajakan
  - Menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan semua jenis pajak (PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPN)
  - Menyusun laporan

## 6. Kepala Bidang Personalia dan umum

Melaksanakan tugas seperti:

- Mengkoordinir pembuatan laporan manajemen, mengendalikan tertib administrasi, distribusi, pengarsipkan dan membuat laporan.
- Mengkoordinir pembuatan laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi.
- Membuat laporan aset tetap, mulai dari daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan sampai pencatatan penyusutan serta penghapus-bukuan aset tetap.

Kepala bidang personalia dan umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Administrasi Umum, tugasnya:
- Melakukan dan menata administrasi personal kantor cabang

- Melakukan pemutakhiran *database* karyawan untuk tersedianya data karyawan yang akurat
  - Melakukan tertib administrasi karyawan (pembayaran gaji, lembur, cuti, absensi, dan lain-lain)
- b. Pengadaan, tugasnya:
- Membantu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kerja.
  - Menyiapkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Mengatur dan memelihara sarana dan prasarana kerja agar selalu dalam kondisi siap pakai.
- c. Arsiparis, yaitu:
- Menyiapkan semua arsip-arsip
  - Mendokumentasikan surat-surat dan dokumen-dokumen
7. **Kepala Bidang Program Khusus**, dalam tugasnya dibantu oleh:
- *Account Officer* Khusus
  - Administrasi Khusus
8. **Kepala Bidang JPK**, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Verifikator JPK
  - b. PSO
  - c. Administrasi DNT

### 3.2.3 Visi, Misi, dan Prinsip PT. Jamsostek (Persero)

Visi, misi, dan prinsip PT. Jamsostek Kantor Cabang Bandung I mengacu pada hal yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT. Jamsostek yaitu:

- Visi

Menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta.

- Misi  
Memberikan manfaat yang optimal dengan mutu layanan yang bersaing.
- Prinsip
  1. Kepuasan Peserta Kami  
Kepuasan peserta atas pelayanan dan manfaat program adalah tanggung jawab kami bersama tanpa memandang tingkat dan kedudukan.
  2. Kepuasan Kami  
Kami mengakui dan menghargai peran serta setiap orang bagi keberhasilan perusahaan, bersikap adil serta memelihara lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan pribadi dan keberhasilan bagi semua orang.
  3. Keberhasilan Perusahaan Kami  
Kami yakin keberhasilan perusahaan kami adalah tanggung jawab kami bersama tanpa memandang tingkat dan kedudukan, dengan prestasi yang proaktif, inovatif, paantang menyerah, bersikap positif terhadap kritik, jujur, dan dapat diandalkan.

### **3.3 Metode Tugas Akhir**

Dalam usaha mengumpulkan dan mendapatkan data lengkap unntuk menyusun laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan objek .

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan (*Field research*)

Mengadakan penelitian secara langsung ke PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung 1 yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data masukan mengenai masalah yang akan diteliti.

a. Observasi (*Observation*)

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung 1 khususnya pada Bidang Keuangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada Bidang Umum dan Bidang Keuangan yang berhubungan dengan perolehan dan penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung 1.

2. Studi kepustakaan (*Library research*)

Dalam studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan mencari referensi dan teori-teori yang berhubungan dengan perolehan dan penyusutan aset tetap.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **4.1 Perolehan Aset Tetap**

Pengertian aset tetap menurut PT. Jamsostek (Persero) sama dengan pengertian-pengertian aset tetap pada umumnya, yaitu aset berwujud yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Pada PT. Jamsostek (Persero) pengklasifikasian aset tetap secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur tidak terbatas dan tidak dapat disusutkan, yaitu tanah.
- b. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur terbatas dan dapat disusutkan selama umur manfaatnya. Apabila masa penggunaannya telah habis, maka aset tetap tersebut dapat diganti dengan aset sejenisnya.

Sedangkan kriteria-kriteria yang mengatur bahwa aset tersebut merupakan aset adalah:

- Nilai perolehannya harus lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000,
- Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.

Tujuan dari pengklasifikasian aset tetap tersebut adalah untuk mempermudah pencatatan, perhitungan biaya penyusutan dan pemahaman dalam membaca laporan keuangan, terutama bagi pihak manajemen yang berkepentingan dalam melakukan aktivitas pengendalian terhadap kegiatan operasi perusahaan.

#### **4.1.1 Golongan, Jenis dan Masa Manfaat Aset Tetap**

Pada PT. Jamsostek (Persero) aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tanah

Yaitu tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk menjalankan kegiatan normal perusahaan, antara lain berupa bangunan halaman serta tanah untuk lainnya. Luas tanah yang dimiliki perusahaan adalah 3081m<sup>2</sup>. Tanah tersebut diperoleh melalui pembelian tunai dan diakui pada saat harga diterima sesuai dengan harga perolehannya.

2. Bangunan

Yaitu gedung atau bangunan yang dimiliki serta dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. PT. Jamsostek (Persero) memiliki beberapa bangunan yang digunakan sebagai kantor, yang berada di jalan P.H.H. Mustofa No. 39 Bandung. Bangunan tersebut diperoleh melalui pembelian tunai dan diakui pada saat harga diterima sesuai dengan harga perolehannya.

3. Kendaraan Dinas

Yaitu kendaraan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Perusahaan membagi kendaraan dinas ke dalam dua golongan, yaitu mobil dan motor.

4. Peralatan Kantor

Peralatan kantor yaitu termasuk mesin dan mebelair, yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan. Yang dimaksud mesin di sini bukan mesin-mesin berat melainkan mesin fotokopi, mesin hitung dan mesin laminating. Sedangkan mebelair yaitu meja, kursi, lemari pintu kaca geser, rak arsip, dan lain-lain.

5. Peralatan komputer

Peralatan komputer digunakan untuk membantu melakukan kegiatan perusahaan, terdiri dari komputer, server, jaringan, mesin cetak atau printer.

## 6. Peralatan Lain

Peralatan lain-lain digunakan untuk membantu menunjang kegiatan perusahaan. Yang termasuk peralatan lain adalah interior gedung, peralatan JPK, dan peralatan lain-lain.

Masa manfaat aset tetap berwujud pada PT. Jamsostek (Persero) terdiri dari 4-20 tahun. Untuk lebih jelasnya di bawah ini tabel 4.1 mengenai taksiran masa manfaat aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero):

**Table 4.1**  
**Taksiran Masa Manfaat Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat
1	Tanah	-
2	Bangunan	20-40 Tahun
3	Kendaraan Dinas	5-20 Tahun
4	Peralatan Kantor	4-10 Tahun
5	Mesin dan Instalasi	5-20 Tahun
6	Peralatan Lain	5-20 Tahun

### 4.1.2 Kebijakan Perolehan Aset Tetap

Perusahaan menilai aset tetap berdasarkan harga transaksi (harga faktur) dan ditambah biaya-biaya lain sampai membuat aset tersebut siap untuk digunakan.

Sampai dengan saat ini PT. Jamsostek (Persero) dalam memperoleh aset tetap berwujudnya hanya melalui cara pembelian tunai. Hal ini dikarenakan pertimbangan berbagai hal, salah satunya karena perusahaan mempunyai cadangan dana tersendiri untuk memperoleh aset tetap nya. Dana tersebut terpisah dengan dana untuk pengeluaran hal-hal lain. Sehingga hasil yang diperoleh adalah perusahaan tidak menggunakan cara lain selain pembelian tunai dalam memperoleh aset tetapnya.

Perolehan aset tetap dibebankan ke akun Belanja Modal di sisi kredit, sedangkan untuk sisi debitnya adalah tentu dicatat pada akun Aset Tetap. Dalam pencatatan perolehan aset tetapnya perusahaan tidak mencatatnya dalam akun Kas tetapi akun Belanja Modal, hal ini

dikarenakan untuk perolehan aset tetap, perusahaan mencadangkan dana tersendiri sehingga tidak disatukan dengan pengeluaran-pengeluaran lain. Prosedur akun Belanja Modal ini sama dengan prosedur akun Petty Cash seperti yang telah kita ketahui.

Aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian tunai dicatat sebesar harga pokoknya ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pembelian aset tetap tersebut hingga siap untuk dipakai.

Contoh: Pada tanggal 7 April 2011 perusahaan dibeli secara tunai peralatan komputer yaitu 7 unit mesin cetak printer laserjet dengan total harga Rp. 36.750.000,-.

Jurnal untuk mencatatnya adalah:

Dr. Aset Tetap Peralatan Komputer	Rp. 36.750.000,-
Cr. Belanja Modal	Rp. 36.750.000,-

#### **4.1.3 Biaya Selama Masa Perolehan Aset tetap**

Pengeluaran yang dilakukan PT. Jamsostek (Persero) dalam masa perolehan aset tetapnya ada dua, yaitu:

- Pengeluaran modal  
Adalah pengeluaran-pengeluaran yang kemungkinan dimasa depan akan memberikan manfaat lebih dibanding sebelum pengeluaran tersebut dikeluarkan. Kriterianya adalah pengeluaran tersebut nilainya lebih atau sama dengan Rp. 2.000.000, menambah masa manfaat dari aset tersebut, dan meningkat dalam kualitas maupun kuantitas. Pengeluaran tersebut harus dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan aset tetap tersebut yang bersangkutan.
- Pengeluaran pendapatan  
Adalah pengeluaran rutin yang dikeluarkan perusahaan untuk merawat dan menjaga aset tetapnya untuk dapat tetap dalam keadaan siap pakai. Misalnya adalah pengeluaran untuk ganti oli kendaraan dinas, dan

sejenisnya. Pengeluaran tersebut dibebankan kedalam akun beban tahun berjalan.

## **4.2 Metode Penyusutan Aset Tetap**

### **4.2.1 Metode Perhitungan dan Pencatatan yang Digunakan PT. Jamsostek (Persero)**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada PT. Jamsostek (Persero), metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung besarnya biaya penyusutan yaitu dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) untuk semua jenis aset. Hal ini terlihat dari laporan penyusutan yang sama setiap tahunnya.

Pemeliharaan penggunaan metode penyusutan garis lurus ini sudah dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan. Alasannya adalah dengan menyesuaikan jenis-jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan.

Karena PT. Jamsostek (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, maka aset tetap yang dimiliki perusahaan bukan aset berat seperti yang dimiliki perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Aset yang dimiliki perusahaan kebanyakan mempunyai umur yang relatif kurang dari sepuluh tahun, selain itu penggunaan aset tetap tersebut setiap tahunnya hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan akan penggunaan asetnya.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan cara perhitungan penyusutan aset tetap yang berdasarkan metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bandung 1.

#### **a. Gedung**

Contoh:

PT. Jamsostek (Persero) melakukan pengadaan gedung pada tanggal 31 maret 2004 dengan harga pokok Rp. 1.532.071.477, nilai sisa Rp.1, dan umur ekonomis 20 tahun.

$$\begin{aligned}
 \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{Umur ekonomis}} \\
 &= \frac{(\text{Rp. } 1.532.071.477 - \text{Rp.1})}{20 \text{ Tahun}} \\
 &= \text{Rp. } 76.603.573,8 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Jurnal penyusutan per tahun adalah:

Dr. Beban penyusutan gedung                      Rp. 76.603.573,8  
 Cr. Akumulasi penyusutan gedung              Rp. 76.603.573,8

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Beban Penyusutan Gedung Per Tahun**  
**Metode Penyusutan Garis Lurus**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Perolehan (Rp)</b>	<b>Beban Penyusutan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)</b>
2004	1.532.071.477	76.603.573,8	76.603.573,8	1.455.467.903,2
2005	1.532.071.477	76.603.573,8	153.207.147,6	1.378.864.329,4
2006	1.532.071.477	76.603.573,8	229.810.721,4	1.302.260.755,6
2007	1.532.071.477	76.603.573,8	306.414.295,2	1.225.657.181,8
2008	1.532.071.477	76.603.573,8	383.017.869,0	1.149.053.608
2009	1.532.071.477	76.603.573,8	459.621.442,8	1.072.450.034,2
2010	1.532.071.477	76.603.573,8	536.225.016,6	995.846.460,4
2011	1.532.071.477	76.603.573,8	612.828.590,4	919.242.886,6
2012	1.532.071.477	76.603.573,8	689.432.164,2	842.639.312,8
2013	1.532.071.477	76.603.573,8	766.035.738,0	766.035.739
2014	1.532.071.477	76.603.573,8	842.639.311,8	689.432.165,2
2015	1.532.071.477	76.603.573,8	919.242.885,6	612.828.591,4

2016	1.532.071.477	76.603.573,8	995.846.459,4	536.225.017,6
2017	1.532.071.477	76.603.573,8	1.072.450.033,2	459.621.443,8
2018	1.532.071.477	76.603.573,8	1.149.053.607,0	383.017.870
2019	1.532.071.477	76.603.573,8	1.225.657.180,8	306.414.296,20
2020	1.532.071.477	76.603.573,8	1.302.260.754,6	229.810.722,40
2021	1.532.071.477	76.603.573,8	1.378.864.328,4	153.207.148,60
2022	1.532.071.477	76.603.573,8	1.455.467.902,2	76.603.574,80
2023	1.532.071.477	76.603.573,8	1.532.071.476	1

Sumber: PT. Jamsostek (Persero), 31 Desember 2011

#### b. Kendaraan Dinas

Pada tanggal 27 Maret 2010 PT. Jamsostek (Persero) memperoleh 1 unit mobil Toyota Avanza seharga Rp. 170.350.000, nilai sisa Rp. 1, umur ekonomis 5 tahun.

$$\begin{aligned}
 \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{Umur ekonomis}} \\
 &= \frac{(\text{Rp. } 170.350.000 - \text{Rp. } 1)}{5 \text{ Tahun}} \\
 &= \text{Rp. } 34.069.999,8 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Jurnal penyusutan per tahun adalah:

Dr. Beban penyusutan kendaraan      Rp. 34.069.999,8

Cr. Akumulasi penyusutan kendaraan      Rp. 34.069.999,8

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Per Tahun**  
**Metode Penyusutan Garis Lurus**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Perolehan (Rp)</b>	<b>Beban Penyusutan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)</b>
2010	170.350.000	34.069.999,8	34.069.999,8	136.280.000,2
2011	170.350.000	34.069.999,8	68.139.999,6	102.210.000,4
2012	170.350.000	34.069.999,8	102.209.999,4	68.140.000,6
2013	170.350.000	34.069.999,8	136.279.999,2	34.070.000,8
2014	170.350.000	34.069.999,8	170.349.999	1

Sumber: PT. Jamsostek (Persero), 31 Desember 2011

**c. Peralatan Kantor**

Pada tanggal 21 Juli 2011 PT. Jamsostek membeli 1 buah kursi rapat seharga Rp. 2.310.000, nilai sisa Rp. 1,- umur ekonomis 4 tahun.

$$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{Umur ekonomis}} \\ &= \frac{\text{Rp. 2.310.000} - \text{Rp. 1}}{4 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp. 577.499,75 per tahun} \end{aligned}$$

Jurnal penyusutan per tahun adalah:

Dr. Beban penyusutan peralatan kantor Rp. 577.499,75

Cr. Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp. 577.499,75

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Beban Penyusutan Peralatan Kantor Per Tahun**  
**Metode Penyusutan Garis Lurus**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Perolehan (Rp)</b>	<b>Beban Penyusutan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)</b>
2011	2.310.000	577.499,75	577.499,75	1.732.500,25
2012	2.310.000	577.499,75	1.154.999,5	1.155.000,5
2013	2.310.000	577.499,75	1.732.499,25	577.500,75
2014	2.310.000	577.499,75	2.309.999	1

Sumber: PT. Jamsostek (Persero), 31 Desember 2011

**d. Peralatan Komputer**

Pada tanggal 26 Mei 2011 PT. Jamsostek (Persero) membeli 1 unit notebook tablet seharga Rp. 9.900.000, nilai sisa Rp. 1, umur ekonomis 4 tahun.

$$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{Umur ekonomis}} \\ &= \frac{\text{Rp. 9.900.000} - \text{Rp. 1}}{4 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp. 2.474.999,75 per tahun} \end{aligned}$$

Jurnal penyusutan per tahun adalah:

Dr. Beban penyusutan peralatan komputer    Rp. 2.474.999,75  
    Cr. Akumulasi penyusutan peralatan komputer    Rp. 2.474.999,75

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**

**Beban Penyusutan Peralatan Komputer Per Tahun  
Metode Penyusutan Garis Lurus**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Perolehan (Rp)</b>	<b>Beban Penyusutan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)</b>
2011	9.900.000	2.474.999,75	2.474.999,75	7.425.000,25
2012	9.900.000	2.474.999,75	4.949.999,5	4.950.000,5
2013	9.900.000	2.474.999,75	7.424.999,25	2.475.000,75
2014	9.900.000	2.474.999,75	9.899.999	1

Sumber: PT. Jamsostek (Persero), 31 Desember 2011

**e. Peralatan Lain**

Pada tanggal 22 Juli 2011 PT. Jamsostek (Persero) membeli 1 buah projector seharga Rp. 9.055.000 nilai sisa Rp. 1,- umur ekonomis 4 tahun.

$$\begin{aligned}
 \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{Umur ekonomis}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 9.055.000} - \text{Rp. 1}}{4 \text{ tahun}} \\
 &= \text{Rp. 2.263.749,75 per tahun}
 \end{aligned}$$

Jurnal penyusutan per tahun adalah:

Dr. Beban penyusutan peralatan lain      Rp. 2.263.749,75

Cr. Akumulasi penyusutan peralatan lain      Rp. 2.263.749,75

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Beban Penyusutan Peralatan Lain Per Tahun**  
**Metode Penyusutan Garis Lurus**

<b>Tahun</b>	<b>Harga Perolehan (Rp)</b>	<b>Beban Penyusutan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)</b>
2011	9.055.000	2.263.749,75	2.263.749,75	6.791.250,25
2012	9.055.000	2.263.749,75	4.527.499,5	4.527.500,5
2013	9.055.000	2.263.749,75	6.791.249,25	2.263.750,75
2014	9.055.000	2.263.749,75	9.054.999	1

Sumber: PT. Jamsostek (Persero), 31 Desember 2011

#### **4.3 Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK 16 (Revisi 2011)**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tidak mengatur tentang penggunaan metode penyusutan bagi perusahaan tertentu, sehingga perusahaan bebas menggunakan metode penyusutan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengatur bahwa metode penyusutan yang digunakan haruslah secara konsisten dengan periode sebelumnya. Metode penyusutan pada PT. Jamsostek (Persero) menggunakan metode garis lurus. Metode ini dipakai agar manfaat ekonomis yang diharapkan dari aset tetap tersebut setiap periode sama sehingga, apabila metode garis lurus ini menghasilkan beban penyusutan yang jumlahnya sama setiap periode, maka akan terjadi perbandingan yang tepat antara pendapatan dengan biaya.

Metode penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero) juga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16) yaitu pada semua golongan aset tetap kecuali tanah, perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dengan cara perhitungan nilai perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan umur teknis masing-masing golongan aset tetap dan dihitung tetap secara konsisten dengan periode sebelumnya. Berbagai metode penyusutan dapat

digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil *review* berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan begitupun dengan metode penyusutan yang digunakan untuk aset di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero) sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (Revisi 2011) karena metode garis lurus yang digunakan PT. Jamsostek (Persero) menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan kepustakaan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, mengenai perhitungan perolehan dan penyusutan aset tetap PT. Jamsostek (Persero), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aset tetap yang dimiliki PT. Jamsostek (Persero) terdiri dari: tanah yang tidak disusutkan, bangunan yang umur ekonomisnya relatif panjang, kendaraan dinas, peralatan kantor, peralatan komputer, dan peralatan lainnya yang umur ekonomisnya relatif pendek dengan masa manfaat antara 4-20 tahun dan diperoleh dengan secara tunai.
2. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Jamsostek (Persero) terhadap aset tetap yang dimilikinya yaitu dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) dengan cara perhitungan nilai perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan umur ekonomis masing-masing golongan aset tetap dan dihitung tetap secara konsisten dengan periode sebelumnya.
3. Metode penyusutan aset tetap pada PT. Jamsostek (Persero) sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (Revisi 2011) karena metode garis lurus yang digunakan PT. Jamsostek (Persero) menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

## 5.2 Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, kebijakan mengenai perolehan dan metode penyusutan aset tetap yang ada di PT. Jamsostek (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2011). Maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Adapun saran yang penulis berikan adalah :

1. Mengenai prosedur dalam pengelolaan aset tetap harus lebih rinci dan rapih.
2. Meskipun dalam perhitungan penyusutan aset tetap pada perusahaan telah sesuai dengan metode PSAK 16 (Revisi 2011) tapi perusahaan diharapkan tetap meninjau setiap nama akun yang ada pada neraca terutama berhubungan dengan aset tetap dan diharapkan metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap di-*review* minimum setiap akhir tahun buku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. 2005. *Pengantar Akuntansi 2*. Jakarta : PT Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan Per Juni 2011*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusup, Al Haryono. 2005. *Dasar-dasar Akuntansi*. Edisi ke 6: Buku 2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.
- Kieso, Donald E, Jerry J Weygandt, Terry D warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 10: Buku 2. Diterjemahkan Oleh Tim Penterjemah Erlangga. Jakarta: Erlangga.
- Raja Adri Satriawan Surya. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salamuddin Daeng. Perkembangan Ekonomi Indonesia Menurut Pengamat Ekonomi Indonesia. 2012. Kompas cetak
- Soemarso S. R., 2005, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku 2 Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat.
- Stice, E Kay, James D Stice, K Fred Skousen. 2005. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 15: Buku 2. Diterjemahkan Oleh Tim Penterjemah Salemba Empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Warren, Carl S, James M. Reeve and Philip E. Fess. 2005. *Accounting Pengantar Akuntans*. Buku Satu Edisi 21, Jakarta: Salemba Empat.
- Wild. Pengelolaan Aset Tetap Menurut Para Ahli. (Online) <http://mbegedut.blogspot.com/pengelolaan-aset-tetap.html>.